

---

## **Dampak Implementasi Program Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi**

**Abdul Hakim<sup>1</sup>, Betty Silfia Ayu Utami<sup>2</sup>, Maziyah Mazza Basya<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [Email: hakim\\_ekis@yahoo.co.id](mailto:hakim_ekis@yahoo.co.id), [betty.silfia@uinsby.ac.id](mailto:betty.silfia@uinsby.ac.id),  
[maziyah.mazza@uinsby.ac.id](mailto:maziyah.mazza@uinsby.ac.id)

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Published: 19 June ,2022

Page: 128-139

#### **Keyword:**

*Smart kampung, Aspek Ekonomi, Aspek layanan Publik*

---

### **Abstract**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi program “Smart Kampung” pada aspek ekonomi dan layanan publik di Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan melalui smart kampung pelayanan desa dilakukan secara terpadu atau terintegrasi pada setiap lini pelayanan terutama pada tingkat pemerintah desa. Dampak adanya program smart kampung pada aspek ekonomi di 10 desa yang menjadi pilot project smart kampung di kabupaten Banyuwangi berbeda-beda, tidak semua daerah merasakan perubahan pada aspek ekonominya. Pemerintah desa diwajibkan untuk mendukung pelaksanaan program smart kampung agar adanya program smart kampung memiliki dampak yang positif terhadap perekonomian warga desanya, yaitu dengan menghasilkan program yang inovatif dengan mendorong adanya kegiatan ekonomi produktif,

**Kata kunci :** *Smart kampung, Aspek Ekonomi, Aspek layanan Publik*

*This study aims to analyze the impact of the implementation of the "Smart Kampung" program on economic aspects and public services in Banyuwangi. Smart kampung provides space for government work programs in all fields in an integrated and integrated manner between one government agency and other governments. The impact of the smart village program on the economic aspect in the 10 villages that became the smart village pilot project in Banyuwangi district is different. The village government is required to support the implementation of the smart village program so that the smart village program has a positive impact on the economy of its village residents, namely by producing innovative programs by encouraging productive economic activities, creative economic activities.*

**Keywords:** *Smart kampung, economic aspect, public services*

Copyright © 2022 *OECONOMICUS Journal of Economics*

---

### **Pendahuluan**

Smart City didefinisikan sebagai penggunaan teknologi komputasi cerdas

untuk mengintegrasikan komponen-komponen penting dari infrastruktur dan layanan kota, seperti administrasi kota,

---

#### **Editorial Office:**

Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia.

Email: [oje@uinsby.ac.id](mailto:oje@uinsby.ac.id)

pendidikan, kesehatan, keselamatan publik, real estate, transportasi dan keperluan kota lainnya, dimana penggunaan kesuluruhannya harus dilakukan secara cerdas saling berhubungan dan efisien (Hasibuan & Sulaiman, 2019). Kota cerdas diidentifikasi pada enam dimensi utama yaitu smart government, smart economy, smart society, smart mobility, smart environment, dan quality of live (Nilma, 2018).

Program Smart Kampung resmi diluncurkan Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, pada 31 Mei 2016. Program ini muncul di karenakan Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di pulau Jawa, sehingga menyebabkan akses dari desa ke pusat pemerintahan sangat jauh, semakin berkembangnya teknologi informasi yang menyebabkan adanya tuntutan untuk mememanfaatkannya semaksimal mungkin serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di desa-desa yang jauh dari kota (Sekarsari & Winarno, 2018). Berbagai layanan administrasi di Desa yang selama ini rumit, kini dapat terselesaikan dengan cepat karena semua surat-surat bisa diurus di desa kecuali Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk karena masih butuh ke kecamatan hanya untuk merekam. Melalui Smart Kampung ini pula seorang kepala desa dan camat bisa menandatangani surat atau dokumen warga secara elektronik. Kapanpun dan dimanapun warga tetap bisa mendapatkan persetujuan tandatangan dari kepala desa dan camat meski yang bersangkutan sedang tak berada di kantornya.

Program Smart Kampung adalah program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi

produktif, peningkatan pendidikan-kesehatan, upaya pengentasan kemiskinan, dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terdapat tujuh kriteria Smart Kampung, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan kapasitas SDM integrasi pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi, program smart kampung menjadikan balai desa sebagai tempat pusat ekonomi produktif melalui pengembangan berbagai jenis usaha yang difasilitasi pelatihannya oleh pemerintah daerah, seperti batik dan produk olahan pertanian. Hasil dari pengembangan usaha nantinya akan dijual atau dipasarkan melalui situs belanja online Banyuwangi-Mall.com. Sehingga produk-produk lokal bisa terangkat dan ekonomi masyarakat bisa meningkat dengan adanya program smart kampung ini.

Menurut Heryanto Monoarfa pelayanan publik adalah pelayanan yang ditargetkan sebagai kepuasan bagi siapapun menerimanya. Dari pendapat dan pengertian pelayanan publik di atas dapat dipahami bahwa pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani kebutuhan, kepentingan orang/masyarakat atau organisasi lain baik di pusat atau di daerah yang ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (Yusnani, 2014). Penelitian-penelitian yang

telah ada sebelumnya telah memaparkan mengenai faktor keberhasilan, indikator, karakter, maupun dimensi Smart City, namun untuk kajian mengenai Smart Kampung, masih belum banyak ditemukan. Proses pembangunan desa menuju Smart Kampung yang dilakukan Banyuwangi diharapkan menjadi model dalam pengembangan konsep ini di Kabupaten lainnya yang memiliki kondisi hampir sama, khususnya di Indonesia, sehingga proses pembangunan tidak serta merta mengambil model di negara lain untuk diterapkan di Indonesia, namun sesuai dengan kondisi dan isu-isu yang berkembang. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dampak implementasi program smart kampung di kabupaten Banyuwangi.

## **Kajian Pustaka**

### **Pengertian Smart Village**

Desa merupakan garda terdepan pemerintah dalam penentuan arah kebijakan dan pembangunan nasional. Untuk itu, penguatan pedesaan menjadi hal yang harus diutamakan. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mengangkat pedesaan menjadi poros pembangunan manusia, infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Smart Village adalah suatu konsep desa pintar yang mengadopsi komponen-komponen atau indikator dari konsep Smart City namun dengan skala yang lebih kecil (wilayah desa atau kelurahan) dengan tujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik terhadap warganya. Sebuah konsep Smart Village (Desa Pintar) bisa dijadikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan mengadopsi komponen Smart City, maka bukan hal yang

mustahil jika dari desa akan muncul kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM, sumber daya manusia yang unggul, pemerintahan yang bersih dan transparan, serta lingkungan sosial yang baik.

### **Konsep Smart Kampung**

Program Smart Kampung adalah program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, peningkatan pendidikan-kesehatan, upaya pengentasan kemiskinan, dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terdapat tujuh kriteria Smart Kampung, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. Proses alur pelayanan terintegrasi berbasis 18 desa/kelurahan yang didukung melalui program Smart Kampung.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Pada teknik wawancara yang digunakan, penentuan informannya menggunakan teknik *purposive sampling*. Penggunaan teknik penentuan informan dengan *purposive sampling* yang dilakukan dalam penentuan *key person* dengan pertimbangan memilih informan yang dianggap dapat memberikan informasi awal tentang apa yang peneliti harapkan (Sugiyono, 2017).

Pada penelitian ini, data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dengan

langkah-langkah sebagai berikut (Rulam, 2014) :

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan.
2. Penyajian data. Penyajian data adalah proses penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya.
3. Menurut miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penelitian ini dilakukan di 10 desa/kelurahan yang menjadi *pilot project* smart kampung di Kabupaten Banyuwangi, seperti yang terlihat pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**Daftar 10 desa/kelurahan**

No	Kecamatan	Desa
1	Kecamatan Glagah	Desa Kampung Anyar
		Desa olehsari
2	Kecamatan Kalipuro	Desa Kelir
		Desa Ketapang
3	Kecamatan Kabat	Desa Pakistaji
		Desa Kalirejo
4	Kecamatan Blimbingsari	Desa Sukojadi
		Desa Gintangan
5	Kecamatan Cluring	Desa Sraten
		Desa Cluring

Adapun informan sebagai *key person* dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Staff IT, Operator Smart Kampung, masyarakat

petani atau pekebun, dan pengusaha menengah.

### Hasil dan Pembahasan

#### Implementasi Program Smart Kampung Di 10 Desa Pada Aspek Ekonomi Dan Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi.

Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.

Implementasi program smart kampung di desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yaitu dimulai dengan membenahi bangunan fisik kantor desa, dari yang sebelumnya tertutup menjadi kantor desa yang terbuka. Perubahan fisik ini penting untuk karena akan menjadi pusat kegiatan masyarakat, selain itu juga memasang perangkat TIK, serta menyiapkan sumber daya yaitu staff IT dan operator smart kampung untuk mendukung suksesnya program smart kampung di 10 desa yang menjadi pilot project smart kampung di Kabupaten Banyuwangi. Kantor desa yang dulunya tidak pernah dikunjungi warga, ruang dan lahan yang sangat minim, dan staff desa yang jarang masuk kantor. Saat ini telah berubah menjadi kantor desa yang menyediakan layanan publik dengan baik, tersedianya layanan internet bagi masyarakat, penataan lahan dan ruangan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan staff desa yang mulai sadar

akan tanggung jawab dan tugas pokok masing-masing. Kepala Desa Kampung Anyar, Siti Latifah Hairiyah menyatakan bahwa:

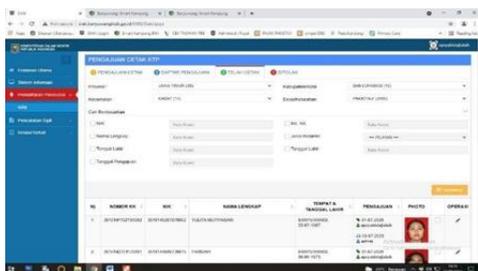
“Adanya program smart kampung meningkatkan layanan publik melalui TIK sangat memudahkan masyarakat, tentu tidak hanya memberikan layanan yang tepat dan cepat kepada masyarakat, smart kampung juga dapat mendorong meningkatnya potensi lokal yang ada di desa Kampung Anyar seperti peningkatan UMKM dan potensi wisata yang ada. Di kantor desa juga disiapkan perpustakaan yang representatif untuk menjadi tempat mengakses bacaan bagi anak-anak. terdapat pula Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) juga telah memiliki bidan yang stand by untuk memberikan pelayanan. Selain itu juga ada BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai jenis potensi yang ada di desa.”

Salah satu desa yang dianggap sukses dalam menjalankan Program Smart Kampung adalah Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Banyuwangi. Smart kampung menjadikan kantor desa menjadi tempat terbuka bagi masyarakat umum, jika dulunya kantor desa dianggap kumuh dan jauh dari kata bersih dan nyaman, maka saat ini kantor desa telah berubah menjadi tempat layanan publik yang menyediakan fasilitas lengkap disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti yang terlihat pada gambar 1 yang mana suasana kantor desa yang bersih dan nyaman.



**Gambar 1**  
**Layanan Publik di Kantor Desa**  
**Ketapang**

Pada aspek ekonomi adanya program smart kampung yaitu mendorong adanya BUMDes di desa Ketapang. Pengembangan sektor ekonomi cerdas didesa Ketapang melalui pengembangan BUMDes Citra Mandiri. Desa di kecamatan Kabat yang menjadi pilot project adalah desa Pakistaji. Implementasi kebijakan smart kampung di desa Pakistaji lebih ditekankan pada penetrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi ke dalam pemerintahan dan masyarakat desa. Terdapat dua langkah utama dalam implementasi smart kampung di desa Pakistaji, yaitu, pertama langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pengadaan infrastruktur penunjang yang bersifat fisik dan non fisik. Penerapan dan internalisasi TIK di desa Pakistaji merupakan usaha untuk mewujudkan desa cerdas secara utuh, dengan melek teknologi maka pintu untuk memperbaiki kondisi ekonomi melalui wisata dan olahan produk lokal akan terbuka. Aplikasi online yang terdapat di program smart kampung sangat mudah mengoperasikan. Para petugas desa seperti operator smart kampung dan staff IT hanya perlu memasukkan Nomor Induk Kependudukan, setelah itu pilih jenis surat yang diinginkan masyarakat. Proses pengajuan KTP melalui aplikasi SIAK online di desa Pakistaji dapat dilihat pada gambar 2.



**Gambar 2 Aplikasi SIAP Desa Pakistaji**

Menurut Bapak Mustain, S.Kom selaku Sekretaris Desa Pakistaji menjelaskan bahwa adanya program smart kampung memudahkan admisnistrasi desa, karena data telah terintegrasi. Pelayanan publik kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan tepat.

Desa yang menjadi *pilot project* di Kecamatan Blimbingsari yaitu desa Sukojadi. Sukojadi adalah desa di Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi yang sukses menjalankan program Smart kampungnya. Terbukti dengan banyaknya kunjungan Pemerintah Pusat ke desa Sukojadi, seperti kunjungan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Dalam kunjungan kerja tersebut, Mendagri menyaksikan langsung berbagai inovasi yang dilakukan Smart Kampung Desa Sukojadi, di antaranya Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dan layanan berbasis teknologi informasi lainnya. Misalnya dalam pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebelumnya Desa Sukojadi termasuk desa tertinggal dibandingkan desa lainnya yang ada di kecamatan Blimbingsari, dengan dukungan dari Bupati banyuwangi yaitu Bapak A. Azwar Anas telah merubah wajah desa Sukojadi yang dulunya dipandang sebelah mata karena ketertinggalannya, saat ini banyak menjadi rujukan bagi daerah lainnya

dalam mengimplementasikan program Smart Kampung.

Awal mula dalam menjalankan program Smart Kampung ini adalah memperbaiki fasilitas fisik maupun non fisik. Yaitu memperbaiki fisik Kantor Desa Sukojadi menjadi lebih baik, melengkapinya dengan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung seperti, ruang tunggu yang bersih dan nyaman, jaringan WIFI, aplikasi smart kampung untuk self service yang tersedia di kantor desa bagi mereka yang bisa teknologi, menyediakan staff IT dan operator smart kampung untuk mendukung terselenggaranya program smart kampung. Pelayanan publik di kantor desa Sukojadi dapat dilihat pada gambar 3.



**Gambar 3 Pelayanan Publik Desa Sukojadi**

Pelayanan publik online yang disediakan pada website desa Sukojadi yaitu persyaratan pembuatan SKCK, persyaratan pembuatan KK, KTP- el, akta kelahiran, akta kematian, SPM, surat pindah nikah. seperti yang dijelaskan oleh bapak Khairul selaku operator Smart Kampung yang menyatakan bahwa :

“Pelayanan publik melalui smart kampung memberi keuntungan bagi pemerintah desa dan juga masyarakat, karena dalam aplikasi smart kampung pemerintah desa dimudahkan dalam melayani masyarakat dan juga melaporkan APBDESnya menjadi lebih transparan, sedang masyarakat diberikan kemudahan dalam pengurusan

surat-surat. Dalam website desa Sukojatati disediakan informasi yang terdiri dari profil desa, layanan, transparansi APBDES, Mitra Desa, Seni dan Budaya, Satgas covid, potensi desa, sehingga informasi yang ada akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi terkini di desa Sukojatati”.

Senada dengan yang disampaikan oleh pak Halim yang berprofesi sebagai petani padi, yang menyatakan bahwa :

“awalnya kami mendapat sosialisasi tentang program Smart Kampung, pada waktu itu saya tidak paham tentang smart kampung, syukurlah petugas desa membantu saya untuk memahami, setelah itu saya langsung senang karena ternyata mudah. Sekarang jika mau mengurus surat-surat waktunya singkat, pelayanannya ramah. tidak ada kesulitan sama sekali karena informasi sudah ada di pengumuman, kita tinggal baca saja, bawa persyaratan, lalu berikan ke petugas Desa, langsung di proses”.

Desa yang menjadi *pilot project* selanjutnya adalah desa cluring yang terletak di kecamatan cluring, kabupaten Banyuwangi. Implementasi Smart kampung di desa cluring dimulai dari merenovasi kantor desa Cluring. Yaitu membenahi ruang layanan publik menjadi lebih bersih, rapi dan nyaman. Jika kita lihat program smart kampung di desa di mulai dari menciptakan kantor desa yang terbuka dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Adapun pelayanan publik yang bisa diakses secara online oleh masyarakat adalah pelayanan pengurusan KTP, pengurusan KK, AKTA kelahiran online, akta kematian online. Sedangkan pelayanan publik lainnya yang tidak di tampilkan di

website desa, masyarakat bisa langsung datang ke kantor desa untuk mengurus kelengkapannya dan akan di bantu oleh staff operator smart kampung. Menurut ibu Hana selaku operator smart kampung desa Cluring menyatakan bahwa:

“Untuk mendukung program smart kampung kami selaku operator smart kampung diberikan pelatihan terlebih dahulu agar dapat mengoperasikan aplikasi smart kampung ini. Dan alhamdulillah tidak ada kendala dalam mengoperasionalkannya. Kendala yang biasanya terjadi adalah jaringan dan mati lampu, selebihnya ndak ada kendala. Untuk prosedur pelayanan publik di smart kampung ini mudah, karena desa sudah punya website desa maka masyarakat yang bisa mengakses secara online, bisa langsung mengajukan melalui online, akan tetapi bagi masyarakat yang tidak paham teknologi nantinya akan dibantu oleh operator smart kampung yang penting membawa persyaratan lengkap maka prosesnya cepat. Karena data semuanya telah terintegrasi dengan dispenduk-capil, sehingga ndak butuh waktu lama. Akan tetapi untuk pengajuan akta kematian dikenakan jangka waktu maksimal 60 hari, jika lebih dari 60 hari maka desa tidak dapat menyelesaikan dan pengurusan harus di dispenduk. Jadi smart kampung ini memudahkan dalam pelayanan publik.”

Program smart kampung ini disambut baik oleh warga masyarakat desa cluring, sebagaimana yang disamaikan oleh bapak Rahmat yang berprofesi sebagai petani desa cluring menyampaikan bahwa:

“Awalnya saya tidak paham smart kampung, setelah itu mendapat sosialisasi dari desa, tentu sangat membantu sekali, saya merasa senang karena mengurus surat-

surat tidak sama seperti dulu, kalau dulu lama sekali mengurus pengajuan KK yang baru sampai berbulan – bulan harus bolak-balik, kalau sekarang cukup membawa KK lama KTP ke kantor desa, nanti tinggal menunggu dari desa cepat sekali ga sampai satu minggu jadi. Nah karena saya pekerjaannya adalah petani buah naga, kalau untuk pelatihan tentang peningkatan hasil pertanian belum ada, pelatihan pemasaran online juga belum ada.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di 10 desa yang menjadi pilot project program smart kampung di kabupaten Banyuwangi, implementasi program Smart kampung telah dijalankan dengan baik, Adapun kendala terkait sinyal atau jaringan tidak menjadi masalah yang berarti. Sarana dan prasarana yang mendukung program smart kampung juga telah di sediakan pemerintah desa dengan baik.

### **Dampak Adanya Program Smart Kampung Pada Aspek Ekonomi Dan Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi**

Dampak implementasi program smart kampung pada aspek ekonomi di 10 desa yang menjadi pilot project program smart kampung berbeda-beda, yang mana tidak semua desa terdampak ekonominya, desa yang belum terdampak secara signifikan pada peningkatan ekonomi masyarakatnya yaitu desa Olehsari, desa Kelir, desa Kalirejo, desa Pakistaji, desa Sraten, dan desa Cluring. Sedangkan desa yang terdampak ekonominya dengan adanya program smart kampung adalah desa Ketapang, desa Kampung Anyar, desa Sukojati, desa Gintangan.

Program smart kampung yang tercermin pada aspek ekonomi adalah berkaitan dengan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja industri daerah pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, manufaktur, pengolahan, packaging, digital marketing, Pengetahuan masyarakat dalam berwirausaha, Jaringan internet, Usaha mikro dan makro masyarakat, Fasilitasi pengembangan permodalan bagi UMKM melalui BUMDes.

Desa Olehsari memiliki potensi yang sangat besar dari sektor pertanian, sebagian besar masyarakat Olehsari bermata pencaharian sebagai petani, produk pertanian yang unggul adalah kacang, sehingga sebagian besar petaninya adalah petani kacang. Adanya program smart kampung pada aspek ekonomi belum dirasakan oleh masyarakat desa olehsari karena para petani kacang masih secara tradisional memasarkan produknya dan sebagian besar para petani tidak memahami teknologi, dan juga sentra industri masih belum ada di desa olehsari, sehingga dibutuhkan adanya pelatihan untuk masyarakat desa olehsari agar dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris desa Olehsari menyatakan bahwa :

“Untuk aspek ekonomi masih belum terlihat efeknya karena memang masyarakat di desa olehsari ini sebagian besar adalah petani kacang dan menjual secara tradisional, mereka belum secara maksimal memanfaatkan teknologi dan fasilitas internet di desa karena tidak semua paham teknologi, hanya beberapa saja yang memanfaatkan untuk mencari pasar.”

Sama seperti desa olehsari, Sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Kelir adalah sebagai petani, sama halnya dengan desa olehsari, dampak implementasi

program smart kampung pada aspek ekonomi juga belum dirasakan oleh masyarakat desa Kelir.

Meskipun terdapat BUMDes akan tetapi masih belum optimal dalam mendorong peningkatan perekonomian desa. Selain petani terdapat pula pengrajin seni barong dan pembuat manisan pala. Namun demikian belum ada pemberdayaan ekonomi yaitu pelatihan dan pendampingan masyarakat untuk menghasilkan produk lokal yang memiliki nilai dan belum ada pelatihan digital marketing sebagai sarana untuk memasarkan produk.

Hal yang sama di rasakan oleh desa Pakistaji, desa Kalirejo, desa Cluring yang belum merasakan adanya dampak pada aspek ekonomi masyarakatnya, karena smart kampung pada desa tersebut lebih banyak membawa perubahan pada aspek pelayanan publik kepada masyarakat. Begitu pula Desa Sragen, Sebagian besar penduduk desa Sragen bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Sama halnya dengan desa Olehsari dan desa Kelir program smart kampung belum menyentuh aspek ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh operator smart kampung yaitu bapak Satrio mengungkapkan bahwa: "Smart kampung di Desa Sragen masih fokus pada pelayanan publik, belum menyentuh pemberdayaan ekonomi masyarakat dan di desa Sragen juga belum ada BUMDes".

Bedasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa program smart kampung di di desa Olehsari, desa kelir, desa Pakistaji, desa Kalirejo, Desa Cluring dan desa Sragen berfokus pada peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat, yang mana masyarakat diberikan kemudahan dalam pengurusan segala surat-surat yang

dibutuhkan. Akan tetapi belum menyentuh aspek ekonomi seperti adanya BUMDes yang bisa meningkatkan kemandirian ekonomi desa dengan berbagai pelatihan dan akses permodalan serta membantu mendistribusikan hasil produk lokal. Sedangkan untuk desa yang terdampak ekonominya adalah desa Ketapang, desa Kampunganyar, desa Sukojati dan Desa Gintangan.

Program smart kampung di desa Ketapang memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Aspek ekonomi yang dilihat adalah berkaitan dengan kualitas dan produktivitas tenaga kerja industri daerah pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, manufaktur, pengolahan, packaging, digital marketing, Pengetahuan masyarakat dalam berwirausaha, Jaringan internet, Usaha mikro dan makro masyarakat, Fasilitasi pengembangan permodalan bagi UMKM melalui BUMDes. Sebelum adanya BUMDes di desa Ketapang terdapat koperasi yang kemudian dengan adanya program smart kampung salah satunya adalah adanya BUMDes, maka yang awalnya koperasi dikembangkan oleh pemerintah desa menjadi BUMDes yang diberi nama BUMDes Citra Mandiri.

Pada awal mula berdirinya yaitu tahun 2015 karyawan BUMDes hanya berjumlah 17 orang dan saat ini sudah berjumlah 25 orang dengan gaji karyawan yang awalnya 600.000 menjadi 1 juta per bulan dan pendapatan desa melalui BUMDes mencapai 100 juta per tahun. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melayani kebutuhan kebutuhan pokok murah lewat Rumah Pangan Kita (RPK) di pasar, kawasan perkebunan dan desa yang jauh dari pusat pasar. Selain RPK, melalui BUMDes

juga ada strategi pemasukan desa melalui jasa foto copy, ATK, pembayaran online rekening listrik, jasa angkut sampah dan simpan pinjam. Dari 10 ribu Kepala Keluarga (KK) di Desa Ketapang, sekarang sudah ada 700-an KK yang menjadi konsumen rutin melalui BUMDes. Pengembangan BUMDes pada awal Januari 2017, menggandeng Bulog dan Bank BNI untuk memasok kebutuhan pokok yang murah. Hal ini menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan desa. BUMDes Citra Mandiri tidak hanya berkontribusi pada pendapatan desa tetapi juga pemberdayaan terhadap masyarakat.

Desa Kampung Anyar mendapatkan dampak positif dengan adanya program smart kampung pada aspek ekonomi masyarakatnya. Salah satu fasilitas yang baru dirintis setelah adanya program smart kampung adalah BUMDes yang bernama sejahtera mandiri. pembentukan BUMDes sendiri bertujuan untuk penguatan lembaga-lembaga ekonomi desa dan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai potensi yang ada di desa.

Untuk meningkatkan ekonomi lokal, pemerintah desa melalui BUMDes yang berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK melakukan pemberdayaan ekonomi yaitu penyuluhan home insutry kepada warga desa Kampung Anyar, tujuannya adalah mengembangkan kemampuan warga dan home industry yang ada di desa Kampung Anyar dapat menjadi lebih baik, pelatihan tersebut adalah terkait pengemasan atau packaging, dan pemasaran yang lebih luas yaitu salah satu contohnya adalah pengembangan UMKM Klemben salah satu produk unggulan yang dihasilkan di desa Kampung Anyar yang dijadikan sebagai oleh-oleh khas desa Kampung Anyar.

Sebelum adanya program smart kampung desa Sukojadi termasuk salah satu desa tertinggal dari segi ekonomi dan sosial di Kabupaten Banyuwangi, sejak adanya program smart kampung, Bupati Banyuwangi menjadikan desa Sukojadi sebagai salah satu pilot project program smart kampung yang merubah desa Sukojadi menjadi desa yang maju dan modern. Adanya program smart kampung mendorong adanya BUMDes di desa Sukojadi. BUMDes yang di dirikan bertujuan yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Salah satu yang dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Di desa Sukojadi banyak pembuat kerupuk dari ikan maupun dari bahan lainnya, selain itu juga ada pembuat gula merah. Para pengusaha tersebut diberikan pelatihan oleh pemerintah desa melalui BUMDes dan berkolaborasi dengan PKK desa Sukojadi yaitu pelatihan peningkatan hasil produksi, kemasan, dan pemasaran produk dengan menggunakan digital marketing, harapannya adalah dengan adanya pelatihan tersebut dapat meningkatkan produktivitas warga desa untuk mengelola potensi lokal menjadi produk yang bernilai ekonomi, sehingga dapat meningkatkan pendapatanarganya.

Adanya program smart kampung di desa Gintangan meningkatkan pendapatan masyarakat terutama para pengusaha dan pengrajin yang ada di desa Gintangan. Melalui BUMDes Simpan Pinjam Anugerah, masyarakat diberikan kemudahan dalam mengakses modal usaha dan memasarkan produknya. Program

Gintangan Bamboo Festival menghadirkan beragam kreasi bambu hasil karya warga desa Gintangan yang digelar selama tiga hari, kerajinan asal bambu, dekorasi rumah, hingga atraksi seni dengan mengangkat tema bambu.

Festival Bamboo ini, adalah upaya mengangkat potensi yang dimiliki oleh masyarakat Gintangan yang selama ini dikenal sebagai sentra kerajinan bambu. Ada puluhan sanggar kerajinan bambu yang turut menyajikan karyanya di sepanjang jalan di sekitar Kantor Desa Gintangan. Ada kap lampu, tempat tisu, tutup nasi, songkok dan beragam perabotan rumah tangga lainnya. Hal ini tentu dijadikan sebagai ajang promosi UMKM di desa Gintangan agar dikenal oleh masyarakat daerah lain bahkan sampai mancanegara yang tujuan akhirnya adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa Gintangan.

Adanya smart kampung memberikan perubahan pada sistem pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi yaitu masyarakat dimudahkan dalam kepengurusan surat-surat dan tidak membutuhkan waktu lama dalam pelayanan publik, sebagaimana yang dirasakan oleh sepuluh desa yang menjadi pilot project smart kampung yaitu desa Kampung Anyar, desa Olehsari, desa Kelir, desa Ketapang, desa Pakistaji, desa Kalirejo, desa Sukojadi, desa Gintangan, desa Sraten, dan desa Cluring. Adanya smart kampung merubah wajah desa yang dikenal ‘Ndeso’ menjadi lebih maju dan modern.

### **Kesimpulan**

Dampak adanya program smart kampung pada aspek ekonomi di 10 desa yang menjadi pilot project smart kampung di kabupaten Banyuwangi berbeda-beda. Meski implementasi program smart

kampung telah berjalan dengan baik di Kabupaten Banyuwangi, khususnya di 10 desa yang menjadi pilot project smart kampung, tetapi tidak semua daerah merasakan perubahan pada aspek ekonominya. Enam desa yang belum terdampak ekonominya dengan adanya smart kampung yaitu desa Olehsari, desa Kelir, desa Kalirejo, desa Pakistaji, desa Sraten, dan desa Cluring. Sedangkan empat desa yang terdampak ekonominya yaitu desa Ketapang, Desa Kampunganyar, desa Sukojadi, desa Gintangan.

Sedangkan dampak adanya program smart kampung pada aspek pelayanan publik di 10 desa yang menjadi pilot project smart kampung di Kabupaten Banyuwangi, secara keseluruhan memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan pelayanan publik. Sebelum adanya program smart kampung masyarakat mengalami kesulitan jika harus mengurus keperluan surat-menyurat ataupun dokumen yang hanya bisa diselesaikan di kota Banyuwangi, mengingat Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa mengakibatkan akses dari Desa ke Kota atau pusat Pemerintahan sangat jauh. Adanya smart kampung memberikan perubahan pada sistem pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi yaitu masyarakat dimudahkan dalam kepengurusan surat-surat dan tidak membutuhkan waktu lama dalam pelayanan publik dan semuanya bisa di selesaikan di kantor desa.

### **Saran**

1. Penambahan infrastruktur IT, yaitu menambah jumlah operator smart kampung untuk desa yang jumlah operatornya hanya 1, agar pelayanan publik melalui smart kampung dapat berjalan dengan lancar serta memperbaiki koneksi jaringan wifi.

2. Pemerintah desa diwajibkan untuk mendukung pelaksanaan program smart kampung agar adanya program smart kampung memiliki dampak yang positif terhadap perekonomian warga desanya, yaitu dengan menghasilkan program yang inovatif dengan mendorong adanya kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, melakukan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi kepada warga desanya

### Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln. (2015). *Pembangunan Ekonomi*(Edisi Kelima). UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Hasibuan, A., & Sulaiman, oris kianto. (2019). Smart City, konsep kota cerdas Sebagai alternatif penyelesaian masalah perkotaan kabupaten/kota. *Buletinutama Teknik*, 14(2), 127–135. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/1097>
- Hidayat, E. dan A. (2016). Peningkatan Layanan Publik Melalui Smart Governance dan SmartMobility. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 4,87–96.
- Nilma. (2018). Analisis Cause Effect Mengenai Dampak Dari Implementasi Bandung Smart City. *Faktor Exacta*, 11(1), 57. <https://doi.org/10.30998/faktorexacta.v11i1.2315>
- Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2019). Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(2), 81106.<https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.279>
- Rulam Ahmad. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Sekarsari, R. W., & Winarno, T. (2018). Smart Kampung Sebagai Wujud Kemajuan Sistem Administrasi Dan Manajemen Di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*,2(2), 82.<https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n2.p82-87>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sukmatama, W. P., Ashadi, A., & Prayogi, L. (2019). Penerapan konsep smart city pada desainkawasan di cibubur. *Jurnal Arsitektur PURWAPURA*, Volume 3 N(June), 16.<https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.04.018>
- Todaro, M.P & Smith, sc. (2015). *Economic Development* (12th Ed). The Pearson Series in Economics : Prentice Hall.